PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
(Survey Pada DPRD Kota Bandung)

Pembimbing :
Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak

Oleh :
SHERILLIA SEPTIRIANE

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of research by the author, to determine the effect of Budget Goal Clarity and Application Public Sector Performance Accounting the Performance Accountability in Parliament Office in Bandung.

The research method used is descriptive analysis and verification methods with quantitative approaches. The population in this study were all employees of Sub Division of Budget and Finance Council Bandung totaling 20 people. The sample selection is done by using saturation sampling method with a sample of 20 people where the total population is equal to the number of samples. The analysis model used is multiple linear regression analysis.

The results of hypothesis testing in this study showed that Clarity Budget Target has a significant positive effect on Performance Accountability means the obvious target for the budget, it is increasingly easy to be accounted for. Implementation of International Public Sector Accounting has a significant positive effect on Performance Accountability means the better implementation of public sector accounting, the more accountable.
Keywords: Budget Goal Clarity, Implementation of International Public Sector Accounting and Accountability Performance

1. Pendahuluan

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab.

Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja yaitu Kinerja pegawai negeri sipil atau PNS sedang mendapat sorotan karena tingginya biaya negara tidak digunakan dengan baik. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ingin memangkas jumlah PNS di lingkungan gedung MPR DPR karena tidak efektif. (Marzuki Alie 2012)

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. (Urip Santoso, 2008)

Fenomena besar yang terkait dalam sektor publik adalah permasalahan pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak segan-segan menyatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Tatang Rustandar Wiraatmaja mengatakan, besarnya alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa telah membutakan mata pejabat pemerintahan dan oknum PNS. Alokasi anggaran untuk pengadaan barang bisa mencapai 30 persen dari total keseluruhan dana APBN. (Tatang Rustandar, 2013)

Berdasarkan Laporan Tahunan 2010 KPK tercatat sejak 2004 terdapat 86 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Beberapa modus yang marak seperti kasus *mark up*, penunjukan secara langsung pemenang tender, pengadaan proyek yang tidak sungguh-sungguh dibutuhkan, kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, pemberian suap, dan pemalsuan. (Daniar Supriadi, 2011)

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Menurut Kenis kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi

pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.
Menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta mengakui, para pengelola anggaran belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Berbagai bentuk masalah pengelolaan muncul, seperti daya serap anggaran lamban dan ketidaktaatan terhadap aturan formal. Di sisi lain, lambannya daya serap anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran program dan angka pertumbuhan ekonomi. Misalnya berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menggambarkan bahwa ternyata hingga 30 Agustus 2013 lalu, realisasi penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 54,8 persen dari Rp1.726,2 triliun sebagaimana yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (ABPN-P) untuk Tahun Anggaran 2013. (Paskah Suzetta, 2011)

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung
2. Untuk mengetahui besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dalam pemecahan masalah yang terjadi pada akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung

1.4.2 Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kembali apakah teori mengenai kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja masih berlaku.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada dasarnya penerapan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penerapan akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan baik sektor publik maupun swasta (Wardini,2008). Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas untuk mempengaruhi pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntabilitas keuangan pada instansi pemerintah.

2.1.1 Anggaran

Anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Kenis dalam Andarias (2009) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Menurut Kenis adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran.

Pengertian anggaran menurut Rudianto (2009) adalah :

"Rencana kerja organisasi di masa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis".

Pengertian Anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2008:1) adalah :

"Anggaran atau lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran".

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam bentuk kuantitas dan dalam suatu periode tertentu.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Menurut Azhar Susanto (2008:4) adalah :

"Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis".

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan".

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai :

"Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Menurut Dedi Nordiawan (2008) akuntansi sektor publik adalah :

"Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan".

Akuntansi Sektor Publik sering disebut Akuntansi Pemerintah, menurut Bahtiar Arif, dkk (2009:11) mendefinisikan akuntansi pemerintah adalah :

"Aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna (*users*) berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan tersebut".

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama.Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dandilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Indra Bastian (2010:385) adalah sebagai berikut :

"Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban".

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP adalah:

"Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik".

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban yang harus disampaikan dan di perpertanggungjawabkan atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.3.2 Pengertian Kinerja

Prawirosentono (2008:2) mengemukakan bahwa kinerja adalah

"Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika".

Pengertian kinerja menurut Wirawan (2009:5) adalah

"Keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu".

Dari beberapa definisi tentang kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.3.3 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Maryanto (2007 : 1) pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

"Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodic".

Sedangkan menurut Mahsun (2006 : 83) pengertian Akuntabilitas Kinerja adalah :

"Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic".

2.1 Kerangka Pemikiran

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. (Dedi nordiawan, 2008:19).

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:20) mendefinisikan anggaran sebagai berikut :

"Anggaran dapat dikatakan sebagai rencana finansial yang menyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar masukan tersebut".

Sedaangkan Menurut Ida Bagus Agung Dharmanegara (2010:2) mendefinisikan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam suatu unit(satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam suatu unit(satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Istilah Sektor Publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik,hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (akuntansi sektor publik, Mardiasmo).

Menurut Deddi Nordiawan (2008:1) yang dimaksud dengan akuntansi menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2009), yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik yaitu suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yabg dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan menurut *Tokyo Declaration of Guidelines on Publik Accountability* bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program-program atau kegiatan-kegiatan.

2.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja

Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. (Mardiasmo, 2009). Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. (Mardiasmo, 2009:63)

Diantara faktor-faktor tentang akuntabilitas beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain oleh Anjarwati (2012) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Subjek dari penelitian ini adalah kepala/pimpinan dari masing-masing SKPD tersebut. Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel independennya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa pertama kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Kusumaningrum (2010) ditujukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja financial kepada stakeholdernya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian/ kepala sub seksi pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 108 orang. Analisis Regresi yang dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) digunakan untuk menganalisis data. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. (Bambang Pamungkas, 2012)

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Dewasa ini, akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik. (Indra Bastian, 2010:88)

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

2.3 Hipotesis

Menurut Ummi Narimawati hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang perlu dibuktikan secara statistik. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukanya penelitian dalam hal pendugaan, meggunkan satistika untuk menganalisisnya.

Menurut Andi Supangat (2008: 4) pengertian hipotesisis adalah sebagai berikut:

> “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat kalimat”.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang mempunyai sifat sementara dan untuk menyakinkan jawaban sementara harus dilakukan suatu pengujian terhadap data tersebut sehingga sampai terbukti bahwa jwaban setelah dilakukan pengujian dapat menghasilkan data yang benar.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
2. Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:38), menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut :

> "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2008:4), menyatakan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut :

> "Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".
>
> Pengertian penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Umi Narimawati, (2010:29) metode deskriptif adalah
>
> "Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".
>
> Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam adalah sebagai berikut:
>
> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, dan memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain. Dan disertai analisis dan diinterprestasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kejelasan sasaran anggaran dan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teoriteori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3.3 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu perencanaan dan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistimatis. Menurut Umi Narimawati (2010 : 30) desain penelitian adalah :

> "Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Menurut Sugiyono (2008:13) dapat disimpulkan proses penelitian kuantitatif meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber masalah
   Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan.
   Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.
2. Rumusan masalah
   Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
   1. Seberapa besar kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di DPRD Kota Bandung
   2. Seberapa besar penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Sekretariat DPRD Kota Bandung

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
   Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.
4. Pengajuan hipotesis
   Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual). Berikut hipotesa yang dirumuskan peneliti :
   H.1 Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
   H.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
5. Metode penelitian
   Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Metode kuantitatif digunakan untuk memberi skor dan menganalisis menggunakan statistik.
6. Menyusun instrumen penelitian
   Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:
   a. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
   b. Untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja

   Selanjutnya penulis mulai menggunakan perhitungan dengan menggunakan MSI (*Method Succesive Interval*) untuk menaikan skala ordinal menjadi interval, analisis korelasi untuk meneliti erat tidaknya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja, koefisien determinasi untuk menilai besarnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja, dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t.
7. Kesimpulan
   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yangberupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel ini diperlukan untuk menjabarkan variabel-variabel penelitian ke dalam indikator tertentu untuk memudahkan pengukurannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, untuk menghindarkan kekeliruan dalam menafsirkan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel yang akan diukur, sehingga variabel-variabel yang akan diteliti diberi batasan-batasan secara operasional.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel agar variabel-variabel penelitian dapat dioperasikan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang harus diteliti, yaitu variabel

independen (X1 dan X2) sebagai variabel bebas dan variabel dependen (Y) sebagai variabel terikat. Adapun penjelasan untuk setiap variabel
Adalah sebagai berikut :

1. Variabel *Dependen* (Y)
   Variabel *dependen* adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel *dependen* dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala ordinal dengan memberikan nilai dan jawaban.
2. Variabel *Independen* (X)

Variabel *indipenden* atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variable X adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala ordinal dengan memberikan nilai pada jawaban.

3.5 Sumber Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1. Data primer adalah data segala informasi yang diperoleh, diamati, dan dicatat oleh peniliti langsung dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010 : 37) data primer adalah :
   "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".
2. Data Sekunder adalah data atau informasi yang berasal dari media cetak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010 : 37) data sekunder adalah :
   "Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber Data primer dan Data Sekunder diperoleh dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, dengan mengadakan penelitian dan kuesioner pada Sub Bagian Anggaran dan Keuangan pada Kantor DPRD Kota Bandung dan ada sebagian data atau informasi yang berasal dari media cetak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis kuesioner ini adalah kuesioner tertutup.

3.6 Populasi dan Penarikan Sampel

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009:115) menjelaskan pengertian populasi adalah:
"Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sub Bagian Anggaran dan Keuangan DPRD Kota Bandung yang berjumlah 20 orang.

2. Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek tertentu. Obyek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010) :
"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh atau disebut juga sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Menurut Sugiyono (2009:78) *sampling* jenuh adalah:
"*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain sampel jenuh adalah sensus".

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang penulis ambil adalah sebanyak 20 orang dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Hal ini penulis lakukan karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akurat, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan menggunakan usaha-usaha khusus, diantaranya dengan terjun langsung ke instansi melalui:

a. Metode pengamatan atau *Observasi* adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada

objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada bagian anggaran dan keuangan pada kantor DPRD Kota Bandung.

b. Metode wawancara atau *Interview* adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.
c. Penggunaan Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan.

3.8 Pengujian Alat Ukur Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Penggunaan instrumen penelitian harus di uji terlebih dahulu apakah instrument tersebut valid atau tidak. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi.

Menurut Sugiyono (2009:121) validitas adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur.

Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:42),validitas adalah :

"Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara masing-masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada korelasi *pearson* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \ (\sum y)}{N}}{\sum x^2 - \frac{\sum X^{\ 2}}{N} \quad \sum Y^2 - \frac{\sum Y^{\ 2}}{N}}$$

Umi Narimawati (2010:42)

Keterangan :
r = Koefisien korelasi pearson
X = Skor item pertanyaan
Y = Skor total item pertanyaan
N = Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument
Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%).

Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\ \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} : db = n - 2$$

Umi Narimawati (2010:42)

dimana :
n = ukuran sampel
r = Koefisien Korelasi Pearson
df = degree of freedom = n-2

Keputusan pengujian validitas instrument dengan menggunakan taraf signifikan dengan 5 % satu sisi adalah :
1. Item instrumen dikatakan valid jika t-hitung > t-tabel maka instrumen tersebut dapat digunakan.
2. Item instrumen dikatakan tidak valid jika t-hitung < t-tabel maka item tersebut tidak dapat digunakan.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan *software SPSS 14.0 for windows*.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut *Coope*r dalam Umi Narimawati (2010:43), reliabilitas adalah :

"Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuracy, precision,and consistency".

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan.

Setelah melakukan pengujian validitas butir pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrumen.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method* (*Spearman–Brown Correlation*) Teknik Belah Dua. Metode ini menghitung reliabilitas dengan cara memberikan tes pada sejumlah subyek dan kemudian hasil tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar (berdasarkan pemilihan genap–ganjil). Cara kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Item dibagi dua secara acak (misalnya item ganjil/genap), kemudian dikelompokkan dalam kelompok I dan kelompok II
b. Skor untuk masing–masing kelompok dijumlahkan sehingga terdapat skor total untuk kelompok I dan kelompok II
c. Korelasikan skor total kelompok I dan skor total kelompok II

$$\frac{2r'_b}{1+r'_b}$$

Umi Narimawati (2010:44)

d. Hitung angka reliabilitas untuk keseluruhan item dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$r'_1=\frac{2r'_b}{1+r'_b}$$

Umi Narimawati (2010:44)

Dimana :

r'_1 = reliabilitas internal seluruh item

r'_b = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua

3.8.3 Uji MSI (*Method of Successive Interval*)

Sehubungan dengan penelitian ini yang menggunakan data ordinal seperti dijelaskan dalam operasionalisasi variabel sebelumnya, sedangkan syarat analisis dengan verifikatif uji statistik menggunakan korelasi pearson minimal berskala interval, maka semua data ordinal yang terkumpul terlebih dahulu akan ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval. Langkah-langkah untuk melakukan transformasi data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban, berdasarkan hasil jawaban responden pada setiap pernyataan.
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi frekuensi (f) dengan jumlah responden.
3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, dilakukan penghitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
4. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pernyataan dan setiap pilihan jawaban.
5. Menentukan nilai interval rata-rata untuksetiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{Scale Value} = \frac{\text{(Dencity at Lower Limit)} - \text{(Dencity at Upper Limit)}}{\text{(Area BelowUpper Limit)} - \text{(Area Bellow Lower Limit)}}$$

Data penelitian yang sudah berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan data variabel independen dengan variabel dependen serta ditentukan persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. Adapun di dalam proses pengolahan data MSI tersebut, peneliti menggunakan bantuan program *software* MSI.

3.9 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.9.1 Rancangan Analisis Deskriptif

Rancangan Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif.

1. Analisis Kuantitatif

   Menurut Sugiyono, 2009:31:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik, statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Penelitian menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sample yang dilakukan secara *random.* Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafis garis, grafis batang, *pichart* (diagram lingkaran) dan *pictogram.* Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

Dari definisi diatas peneliti menggunakan analisis kuantitatif untuk melakukan rancangan analisisnya, karena data yang akan diolah adalah data menggunakan statistik. Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang diuraikan diatas adalah:

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali, 2007:110 :

"Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik" Analisis Grafik

Menurut Imam Ghozali, 2007:110 :

"Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal*probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya".

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diadonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghozali, 2007:110 adalah:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data meyebar jatuh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2011:177) mendefinisikan uji multikolinieritas sebagai berikut:

"Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen".

Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian *pearson* koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Sumber: Husein Umar (2011:179)

Menurut Husein Umar (2011:178) untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas, dapat diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat kecurangan dan kelemahan lain;
2. Jumlah data ditambah lagi;
3. Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel independen ternyata mirip atau digabungkan jika secara konsep relatif sama; dan
4. Gunakan metode lanjut seperti regresi *bayesia*n atau regresi *tolerance*".

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

4. Uji Autokolerasi

Menurut Husein Umar (2011:182) mendefinisikan uji autokorelasi sebagai berikut:

"Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat diantara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik *Durbin-Watson* (D-W).

3.10 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah analisis regresi linier berganda.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Umi Narimawati analisis regresi linier berganda adalah :

"Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2), persamaan regresinya sebagai berikut:

X_2

Sumber: (Sugiyono, 2009:192)

2. Analisis Korelasi

Menurut Sujana dalam Umi narimawati (2010:49), pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel x dan y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi *Pearson* dengan rumus :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Umi Narimawati, 2010:50)

r = koefisien korelasi
x = Kejelasan sasaran anggaran, Penerapan akuntansi sektor publik
y = akuntabilitas kinerja

3. Analisis Koefisien Determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari kofisien korelasi (r^2). Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = (r)^2 \times 100\ \%$$

Keterangan :
Kd = Koefisien Determinasi
r = Koefisien Korelasi

Adapun rumus Zero-Order yaitu :

$$Kd = Beta \times Zero\text{-}Order$$

3.11 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.
Langkah – langkah dalam analisisnya sebagai berikut :

1. Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji-t, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut :

a. Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$r = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad}$$

Umi Narimawati (2010:53)

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

b. Hipotesis

H_0 ; ρ = 0, Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
H_a ; ρ ≠ 0, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
H_b ; ρ = 0, Penerepan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja.
H_c ; ρ ≠ 0, Penerpan Akuntansi Sekor Publik berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja

c. Kriteria Pengujian

H_0ditolak apabila t_{hitung}< dari t_{tabel} (α= 0,05)
Kriteria Penarikan Pengujian:
Jika menggunakan tingkat kekeliruan (= 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.
c. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel Y dan variabel Z ada hubungannya

d. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel Y dan variabel Z tidak ada hubungannya.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada hasil kriteria yang telah dijelaskan diatas, juga dari teori-teori yang mendukung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Analisis Deskriptif

1. Kejelasan Sasaran anggaran

Pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dari 6 (enam) item pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Berdasarkan skor perhitungan presentase tanggapan responden terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 433 dengan skor ideal sebesar 600,00 sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 72,17%. Nilai

persentase total skor dari variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 433 berada di antara interval 408 – 504 atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berada dalam kategori baik.

2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dari 14 (empat belas) item pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik yang dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Berdasarkan skor perhitungan tanggapan responden terhadap variabel penerapan akuntansi sektor publik diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 938 dengan skor ideal sebesar 1400, sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 67%. Menurut Umi Narimawati (2007:85) nilai persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup berada pada interval "52.01% – 68.00% " atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada Kantor DPRD Kota Bandung menerapkan akuntansi sektor publik yang cukup**.**

3. Akuntabilitas Kinerja

Pada variabel Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 6 (enam) item pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Kinerja yang dalam pengambilan datanya menggunakan kuisioner. Berdasarkan skor perhitungan tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas kinerja diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 385 dengan skor ideal sebesar 600, sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 64.71%. Menurut Umi Narimawati (2007:85) nilai persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup berada pada interval "52.01% – 68.00% " atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada Kantor DPRD Kota Bandung memiliki kriteria yang cukup.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Namun karena data hasil tanggapan responden masih berbentuk ordinal, maka sebelumnya diolah manggunakan analisis regresi terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi data interval melalui *methods of successive interval*.

a. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi dikemukakan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien-kofisien regresi tidak bias dan mendekati keadaan yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka asumsi regresi yang akan diuji adalah asumsi multikolinieritas. Heterokedastisitas, normalitas, dan asumsi klasik.

1. Pengujian Normalitas

Dalam regresi linear disturbance error atau variabel gangguan (e_i) berdistribusi secara normal atau acak untuk setiap nilai Xi, mengikuti distribusi normal disekitar rata-rata. Grafik tersebut menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

2. Pengujian Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan situasi dimana adanya korelasi yang hampir sempurna antar variabel bebas dalam sebuah model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda yang baik seharusnya terbebas dari masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF) dengan kriteria pengujian apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier berganda tidak ditemukan multikolinearitas antar variabel bebasnya. Berdasarkan tabel 4.25 di atas menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* (0,967) yang lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIF (1,034) kurang dari 10. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang akan dibentuk terbebas dari multikolinearitas, sehingga model memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi linier berganda.

3. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, syarat klasik ini dalam Analisis Regresi adalah harus tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang berarti, varian residual harus sama. Berdasarkan gambar 4.34 di atas telihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbuh Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi

yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak effisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil.

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W):

$$D-W=\frac{\sum(e_t-e_{t-1})}{\sum e_t^2}$$

Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

- Jika D-W < d_L atau D-W > 4 – d_L, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
- Jika d_U< D-W < 4 – d_U, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
- Tidak ada kesimpulan jika : $d_L \leq$ D-W $\leq d_U$ atau 4 – $d_U \leq$ D-W $\leq$4 – d_L (Gujarati, 2003: 470).

Dari tabel di atas diperoleh nilai d sebesar 1,951. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin-Watson. Untuk α=0.05, k=2 dan n=20 diperoleh $d_{L=}$ 1,1044 dan $d_{U=}$ 1,5367. Nilai d > d_L , maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

b. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar 3,524. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 0,252, nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 0,329.

Maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y = 3,524 + 0,252 (X1) + 0,329 (X2)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,252, artinya jika kejelasan sasaran anggaran mengalami perubahan nilainya 1 dan penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilainya 0 maka akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar Y= 3,524 + 0,252(1) + 0,329(0) = 3,776

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja adalah sebesar 0,607 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval “0,600 - 0,799”, artinya semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar 32,1% terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan.

Hasil dari pengujian nilai $t_{\text{-hitung}}$ yang diperoleh variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 3,187 lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,1) dan berada didaerah penolakan Ho, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak Ho dan menerima Ha. Artinya bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja

Hal ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya dapat melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan. Seperti daya serap anggaran lamban dan ketidaktaatan terhadap aturan formal.

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009), yaitu anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Anjarwati (2012) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bila semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2010) yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.2.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, koefisien regresi penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,329, artinya jika penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilainya 1 dan kejelasan sasaran anggaran mengalami perubahan nilainya 0 maka akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar Y= 3,524 + 0,252(0) + 0,329(1) = 3,943

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,526. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Sugiyono (2010) maka artinya korelasi penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,40-0,599, artinya semakin baik penerapan akuntansi pemerintahnya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sisanya sebesar 73,9% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil dari pengujian nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar 2,590 lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,1) dan berada didaerah penolakan Ho, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah menolak Ho dan menerima Ha. Artinya bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
Hal ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa banyaknya kasus korupsi yang tidak berhasil diungkap Kantor DPRD Kota Bandung. Berdasarkan laporan KPK tercatat sejak tahun 2004 trdapat 86 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa beberapa modus yang marak seperti kasus mark-up, pemberian suap dan pemalsuan.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang diungkap Bambang Pamungkas (2012), yaitu penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.
Sesuai dengan penelitian Bambang Pamungkas (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan akan meningkatkan mutu laporan pertanggungjawaban.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada pada Kantor DPRD Kota Bandung. Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki hubungan yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukan ketika semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Masalah pada akuntabilitas kinerja terjadi karena kejelasan sasaran anggaran yang belum pasti.

2. Penerapan Akuntansi Sektor publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada DPRD Kota Bandung. Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukan ketika semakin baik penerapan akuntansi sektor publiknya maka kinerjanya semakin dapat dipertanggungjawabkan. Masalah pada akuntabilitas kinerja terjadi karena penerapan akuntansi sektor publik belum berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran-saran pada Kantor DPRD Kota Bandung sebagai berikut :

1. Agar menciptakan akuntabilitas kinerja yang transparan perlu adanya kejelasan sasaran anggaran pada DPRD Kota Bandung, maka sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyajian secara jujur dengan mencatat dan menulis transaksi yang terjadi harus dicatat sepenuhnya sesuai dengan fakta dan penggunaan dana yang diatur secara efektif dan efisien sehingga output yang dihasilkan kedepannnya tidak disalah gunakan.
2. Agar menciptakan akuntabilitas kinerja yang transparan perlu adanya penerapan akuntansi sektor publik yang baik agar kasus *mark up* korupsi pengadaan barang dan jasa tidak terjadi di lingkungan Kantor DPRD Kota Bandung, maka sebaiknya perlu didukung unsur pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek. Karena lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa tersebut berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proyek, berupa penundaan kegiatan atau pencairan dana sehingga program yang diharapkan masyarakat turut tertunda.

Agar terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang bebas dari salah uji material sebaiknya internal auditor harus dituntut secara profesional dalam memperbaiki standar kualitas pelaporan hasil pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan sebaiknya perlu didukung unsur pengawasan atau perlu ditambahnya aparat pemda yang berkualitas dan kompeten sehingga akan meningkatkan pelaksanaan audit.

Agar menciptakan pertanggungjawaban kepada publik yang baik, perlu mengutamakan pelayanan publik. Untuk itu pemerintah haruslah tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan publik.

3. Agar terciptanya akuntabilitas kinerja yang ekonomis dan efisiensi, sebaiknya Kantor DPRD Kota Bandung perlu mengembangkan SDM (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka akan tercipta kinerja yang baik. Pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih efisien dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Aap, A.2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten*. Artikel Penelitian

Andi Supangat. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Parametrik*. Jakarta: Kencana Prenada

Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia Pusat Data Depkominfo*

Bahtiar Arif, 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit: Akademia

Bambang Pamungkas, 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Volume 12 No.2

Deddi Nordiawan, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat

Harsanti, P., Sudaryati, D., & Hilmia, N. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. ISSN: 1979-6889.

http://www.bappenas.go.id/files/7113/5230/0985/minimalkan-akrobat-anggaran-dengan-pengawasan-efektif__20081123212415__1306__0.pdf

http://www.dprdbandungkota.go.id/attachments/article/449/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf

http://dprd.jabarprov.go.id/?m=seputar&t=news&id=1170

http://m.merdeka.com/uang/pengadaan-barangjasa-juara-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk.html

http://nasional.kontan.co.id/news/alokasi-dana-bansos-15-kementrian-melanggar-aturan

http://www.pikiran-rakyat.com/node/186848

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_l0151_0607783_chapter1.pdf

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Bahas-Korupsi-Mahasiswa-FH-Juara-LKTM-Nasional-5308-id.htm

http://sulsel.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/506-semiloka-penyempurnaan-pola-karir-pns-kemenkumham

http://www.tempo.co/read/news/2007/03/13/05595402/Pendidikan-Pegawai-yang-Rendah-Hambat-Kinerja-Pemerintah

http://www.voaindonesia.com/content/icw_perbaiki_kerja_pns_dan_birokrasi/370607.html

Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit: Erlangga

Inspektorat LIPI. 2009. *Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*

Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.* Tesis. Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana.

Lembaga Administrasi Negara, 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit: Andi

Mei Anjarwati, 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. ISSN: 2252-6765

M.Nafarin, 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta. Penerbit: Salemba4

Netty Herawati, 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. ISSN: 0852-8349

Nita Garnita, 2008. Skripsi *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pasal 15 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*
Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010, tentang *Pengadaan Barang dan Jasa.*

Restu Agusti. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Senjangan Anggaran dengan Dimoderasi oleh Variabel Komitmen dan Organisasi dan Informasi Asimetri.*
Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.* Vol.3, No.3, November 2011: 560-568
Rudianto, 2009*. Penganggaran*. Jakarta. Penerbit: Erlangga
Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sunarno Agus Nusantoro dan Heru Subiyantoro. *Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tasikmalaya*

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.

Urip Santoso, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.* ISSN: 0216-1249

UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*